

**BUDAYA PATRIARKI DI PARTAI GOLKAR
(STUDI PADA PARTAI GOLKAR KABUPATEN OGAN ILIR
PERIODE 2004-2014)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Sarjana S1
Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



OLEH:

ERNA YUNIARTI

07071002084

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

S
324.207
Ern
b
2014

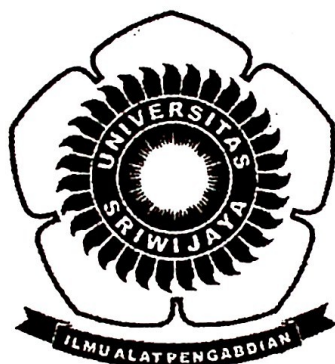
R: 27355/27937



**BUDAYA PATRIARKI DI PARTAI GOLKAR
(STUDI PADA PARTAI GOLKAR KABUPATEN OGAN ILIR
PERIODE 2004-2014)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Sarjana S1
Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



OLEH:

ERNA YUNIARTI

07071002084

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

LEMBAR PENGESAHAN

BUDAYA PATRIARKI DI PARTAI POLITIK

(STUDI PADA PARTAI GOLKAR KABUPATEN OGAN ILIR PERIODE 2004-2014)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ERNA YUNIARTI

(07071002084)

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal April 2014

Dosen Pembimbing 1

Dr. Zulfikri Suleman, M.A

NIP. 195907201985031002



Dosen Pembimbing II

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si

NIP. 196010021992032001



BUDAYA PATRIARKI DI PARTAI POLITIK

(STUDI PADA PARTAI GOLKAR KABUPATEN OGAN ILIR PERIODE 2004 - 2014)

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Pada Tanggal 7 Mei 2014

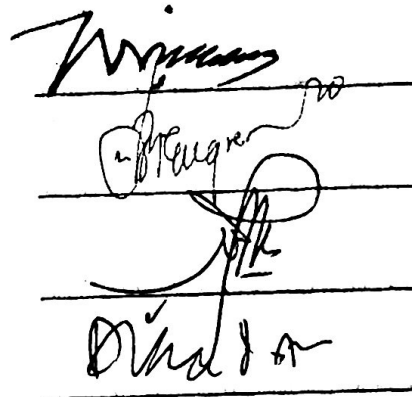
TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman, M.A
Ketua

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
Anggota

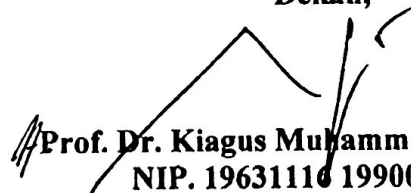
Drs. Tri Agus Susanto, MS
Anggota

Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si
Anggota



**Palembang, Mei 2014
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631116 199003 1 001

Ku Persembahkan Kepada:

Skripsi ini merupakan salah satu buah karyaku yang terbaik

Yang tidak akan pernah ada

Tanpa doa, pengertian, cinta kasih, dan dorongan semangat

Dari orang-orang yang menyayangiku dan kusayangi

Terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan untuk Kedua Orang Tuaku

Bapakku H. Abdul Gopar yang selalu memberikan semangat dalam hidupku

Ibuku Nurbaiti yang senantiasa mengerti dan memberikan cinta serta doa untuk

keberhasilanku

Saudara-Saudaraku tercinta yang selalu memberikan semangat untukku

Kak Ega & Uni Nita, Kak Endang & Ayuk Tia, Ayuk Ninik & Kak Rori serta Dek Eef)

Dan

Kekasihku Firman Syah S.Sos yang selalu mendampingi di kala suka dan duka serta

selalu mengobarkan semangat untukku

Ku Persembahkan Kepada:

Skripsi ini merupakan salah satu buah karyaku yang terbaik

Yang tidak akan pernah ada

Tanpa doa, pengertian, cinta kasih, dan dorongan semangat

Dari orang-orang yang menyayangiku dan kusayangi

Terima kasih yang tak terhingga ku persembahkan untuk Kedua Orang Tuaku

Bapakku H. Abdul Gopar yang selalu memberikan semangat dalam hidupku

*Ibukku Nurbaiti yang senantiasa mengerti dan memberikan cinta serta doa untuk
keberhasilanku*

Saudara-Saudaraku tercinta yang selalu memberikan semangat untukku

Kak Ega & Uni Nita, Kak Endang & Ayuk Tia, Ayuk Ninik & Kak Rori serta Dek Eef)

Dan

*Kekasihku Firman Syah S.Sos yang selalu mendampingi di kala suka dan duka serta
selalu mengobarkan semangat untukku*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Budaya Patriarki di Partai Politik (Studi pada Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014)”. Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana implementasi budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi bagi pengembangan teori-teori sosiologi, terutama teori yang berhubungan dengan sosiologi gender, sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan masukan kepada Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir agar dapat meningkatkan kualitas kader perempuan partai dan mampu bersaing dalam menduduki posisi pengambil kebijakan dalam partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ogan Ilir, penentuan informan dilakukan secara *purposive* atau ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang bertujuan mengambil informasi dari orang-orang yang benar terlibat dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan beberapa tahapan, pertama: tahap reduksi data, kedua: penyajian data, dan ketiga: tahap kesimpulan. Hasil analisis penelitian menggambarkan bahwa budaya patriarki masih melekat dalam tubuh Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir ini terlihat dari dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan partai disetiap periode dan di 16 DPC Partai Golkar serta kaum perempuan yang masuk kepengurusan partai bukan berada pada posisi pengambil kebijakan dalam partai, serta perempuan kurang berperan dalam menjalankan fungsi dan program kerja Partai Golkar. Sehubungan dengan hasil penelitian maka hendaknya Partai Golkar harus memiliki komitmen untuk menghilangkan bias gender seperti usaha-usaha peningkatan pengetahuan politik kader perempuan agar setara dengan kaum laki-laki, serta kaum perempuan sendiri harus serius dalam mengaktualisasikan dirinya secara total dalam dunia politik. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan budaya patriarki mampu dihilangkan dalam tubuh Partai Golkar Ogan Ilir.

Kata kunci: Budaya Patriarki, Partai Politik, dan Fungsi Partai Politik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Budaya Patriarki di Partai Politik (Studi pada Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir” ini salah satu syarat dalam mendapatkan gelas Sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada panglima tertinggi, teladan kita Rasulullah SAW serta para sahabat, keluarga serta para pengikutnya yang terus berjuang menegakan ajaran Islam hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Kedua Orang tuaku terima kasih telah bersabar menunggu gelar sarjanaku, dan tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian studiku.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Dadang Hikmah.Purnama, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
4. Bapak Rudi Kurniawan, S.Th.i, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi.

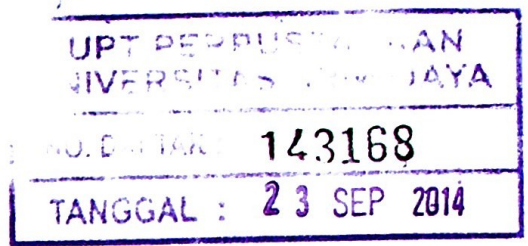
5. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas bimbingan serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis selama skripsi.
6. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si selaku pembimbing II, terima kasih bimbingan dukungan, dan perhatiannya selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fisip Unsri yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta kepada staf pegawai Fisip Unsri telah memberikan kemudahan-kemudahan administrasi selama kuliah.
8. Teman-teman angkatan 2007 Jurusan Sosiologi tanpa terkecuali, semoga jadi sosiolog-sosiolog yang sukses.
9. Untuk seluruh saudara-saudaraku dan kakak serta ayuk iparku yang selalu memberikan dorongan moril dan semangat.
10. Untuk orang yang paling aku cintai Firman Syah, S.Sos terima kasih atas kasih sayang, support, perhatian, serta telah menjadi teman setia untuk mendengarkan semua masalah dan sama-sama mencari solusi terbaik, dan yang terpenting banyak pelajaran hidup yang selalu dirimu ajarkan kepadaku. Semoga Allah meridhoi pilihan yang kita ambil untuk berani melangkah maju menghadapi masa depan dan berharap bertemu dalam dunia indah yang hanya ada kata “cinta” yang kekal.
11. Semua teman-temanku yang selalu ada dalam suka dan dukaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian kadang menjadi

tempatku berkeluh kesah atas kejenuhan-kejenuhan yang melanda hati
dan pikiranku.

Semoga Skripsi ini dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan,
walau penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu
dan pemikiran penulis.

Inderalaya, 24 April 2014
Penulis,

Erna Yuniarti
NIM. 070712084



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Persetujuan	
Halaman Persembahan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Bagan	
Abstrak	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	8
I.3 Tujuan	8
I.4 Manfaat	8
I.4.1 Manfaat Teoritis	8
I.4.2 Manfaat Praktis	9
I.5 Tinjauan Pustaka	9
I.6 Kerangka Pemikiran.....	14
I.7 Metode Penelitian	24
I.7.1 Batasan Konsep.....	24
I.7.2 Sifat Penelitian	24
I.7.3 Jenis Penelitian.....	25
I.7.4 Lokasi Penelitian.....	26

I.7.5 Subyek Penelitian.....	27
I.7.6 Unit Analisis	27
I.7.7 Data dan Sumber Data	27
I.7.8 Metode Pengumpulan Data.....	29
I.7.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
I.7.10 Teknis Analisis Data	22

BAB II PARTAI GOLKAR KABUPATEN OGAN ILIR

II.1 Sejarah Partai Golkar.....	34
II.2 Visi dan Misi Perjuangan Partai Politik Golkar.....	40
II.2.1 Visi Perjuangan	40
II.2.2 Misi Perjuangan	43
II.3 Platform Partai Politik Golkar	44
II.4 Doktrin Partai Golkar.....	47
II.5 Pokok-pokok Program Perjuangan Partai Golkar.....	48
II.6 Kebijakan Umum Partai Golkar	49
II.7 Target Strategi Partai Golkar dalam Pemenangan Pemilu 2014	51
II.8 Posisi Partai Golkar dalam Sistem Multipartai.....	53
II.9 Tantangan Partai Golkar Sekarang dan Masa Depan	55
II.10 Keanggotaan atau Pengkaderan Partai Golkar.....	57
II.11 Penyaluran Aspirasi dan Pemberdayaan Kader	61

BAB III BUDAYA PATRIARKI DI PARTAI POLITIK

III.1 Dominasi Laki-laki dalam Susunan Kepengurusan Partai Golkar Ogan Ilir dan 16 Kecamatan Ogan Ilir	63
III.1.1 Struktur Kepengurusan Periode 2004-2009.....	65
III.1.2 Struktur Kepengurusan Periode 2009-2014.....	68

III.1.3 Profil 16 DPC Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir 2009-2014.....	72
III.2 Rendahnya Kapabilitas Politik Perempuan Partai Golkar Ogan Ilir	77
III.2.1 Fungsi dan Program Kerja Partai Golkar Ogan Ilir	79
III.2.2 Kemampuan Politik Perempuan yang Rendah.....	82
III.2.2.1 Relatif Tidak Bisa Bicara.....	83
III.2.2.2 Tidak Percaya Diri.....	85
III.2.2.3 Pelecehan Oleh Pengurus Laki-laki.....	88
III.2.2.4 Minimnya Pengalaman dan kesempatan Politik Perempuan	90
III.3 Fungsi Partai Golkar Ogan Ilir yang Minimal.....	93
III.3.1 Kehadiran Pengurus Partai yang Minimal	93
III.3.2 Kegiatan Partai yang Sangat Minimal	94
III.3.3 Implikasi kepada Pengurus Perempuan	96
III.5 Kiprah Pengurus Perempuan di DPRD dan Masyarakat	98
III.5.1 Kiprah Pengurus Perempuan di DPRD	99
III.5.2 Kiprah Pengurus Perempuan di Masyarakat.....	101
BAB IV PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan.....	103
IV.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Perempuan Dalam DPR	4
Tabel 2 Susunan Pengurus DPD Partai Golkar Ogan Ilir Masa Bakti 2004-2009	66
Tabel 3 Susunan Pengurus DPD Partai Golkar Ogan Ilir Masa Bakti 2009-2014	69
Tabel 4 Jumlah Pengurus 16 DPC Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Masa Bakti 2004-2009	73

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Pemikiran	23
Bagan 2. Organisasi Perempuan Partai Golkar	62
Bagan 3. Budaya Patriarki dari Drs. Iklim Cahaya, MM	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3. Daftar Konsultasi
4. Daftar Wawancara
5. Kelembagaan dan Struktur Organisasi Perempuan Partai Golkar
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut adanya subordinasi terhadap perempuan.

Sistem patriarki sering juga dihubungkan atau dikonotasikan dengan patrilineal, yakni sistem yang menempatkan ayah, bapak sentral dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan atau khususnya dalam dunia politik.

Dilihat dari sejarah keterlibatan politik perempuan di Indonesia telah membuktikan bahwa posisi dan peran perempuan mencatat suatu prestasi yang cukup strategis. Posisi politik tertinggi pernah diduduki seorang perempuan yaitu menjadi Presiden (misalnya: Megawati Soekarno Putri), Gubernur perempuan dari Provinsi Banten (misalnya : Ratu Atut Choisyah), Walikota Surabaya (Risma Maharani), dan lain-lain.

Persoalanya sekarang bahwa perkembangan posisi dan peran politik perempuan sangat lambat, proporsi peran-peran politik perempuan terhadap kaum laki-laki, terutama jika dibandingkan antara jumlah penduduk perempuan dengan posisi mereka dilembaga politik atau pemerintah terlihat sekali kurang proporsional.

Namun secara kenegaraan atau hukum sesungguhnya masalah patriarki yakni ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sudah sejak Indonesia merdeka tidak diakui. Perempuan dan laki-laki adalah sama, setara atau egaliter¹.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak membedakan antara kedua jenis kelamin atau pembagian kerja secara seksual artinya antara perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan yang sama dan setara. Sejak merdeka para pendiri negara telah sadar bahwa hak antara keduanya adalah sama. Tidak mengenal adanya perbedaan apalagi subordinasi atau diskriminasi terhadap jenis kelamin.

Tekad the founding fathers demikian sudah jelas, yakni perempuan dan laki-laki harus “setara” agar kehidupan masyarakat dan atau khususnya kehidupan politiknya lebih baik dari keadaan-keadaan sebelumnya.

Namun dalam perjalanannya tekad yang sudah dirumuskan dengan jelas dalam konstitusi tersebut tidak sesuai harapan. Dimana perbedaan biologis menjadi bermakna politis, ekonomis, dan sosial manakala tatanan kultural dalam masyarakat mengenal pembagian kerja secara hirarkis antara perempuan dan laki-laki. Sehingga faktor kultural ditransformasikan bersama faktor biologis ke dalam masalah sosial dan politik yang pada akhirnya menyebabkan subordinasi perempuan oleh laki-laki baik disektor publik maupun domestik (Jo Feeman, 1970)².

¹ Perempuan merupakan makhluk yang sejajar dengan kaum laki-laki. Tanpa perempuan kurang lengkaplah kehidupan bermasyarakat, terutama dalam mewujudkan akses pembangunan. Menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki tersebut bukanlah hal yang mudah, karena diperlukan kemitraan antara laki-laki dan perempuan atau yang kita kenal dengan konsep gender. Konsep gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak serta kewajiban yang diwujudkan melalui kesempatan, kedudukan, dan peranan, yang dilandasi oleh sikap serta perilaku untuk saling membantu dan mengisi segala aspek kehidupan yang berjalan secara harmonis (Onney s Pijiono, 1996)

² LKPSM, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoks*, editor M.Jadul Maula, Yogyakarta, hal.4-5

Disadari atau sebaliknya dalam kehidupan masyarakat peran-peran perempuan tetap terpinggirkan sebagaimana pada era-era sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang berperan dalam jabatan-jabatan masyarakat dan atau khususnya dalam bidang politik berkembang secara lamban.

Mengapa dan bagaimana ketimpangan itu terus berlangsung, pada umumnya dikonotasikan dengan faktor budaya. Yakni masih kuatnya cengkeraman budaya patriarki di Indonesia. Masih kuatnya kultur patriarki³ di Indonesia ini tidak dihadapi perempuan dalam sektor privat saja melainkan juga di sektor publik/politik khususnya pada partai politik.

Budaya, seperti budaya politik yang seharusnya dikembangkan melalui nilai-nilai baru yang “egaliter, demokratis atau setara” masih jauh pasak dari tiang. Fakta ini paling tidak dapat dilihat dari partisipasi politik perempuan sejak merdeka hingga saat ini masih jauh dari kesetaraan, demokrasi atau egalitarian. Ketimpangan peranannya dapat dilihat dalam salah satu bidang kekuasaan/politik, yakni pada lembaga legislatif (DPR, DPRD, DPD, MPR). Fungsi atau peran perempuan masih sangat minim dalam berbagai kegiatan. Kalaupun mereka hadir dalam lembaga tersebut, tak lebih tak kurang kecenderungannya hanya sekedar pelengkap saja. Untuk membuktikannya dapat dilihat dalam data dibawah ini:

Pada periode legislatif 1950-1955 keterwakilan perempuan didalamnnya hanya 3,8 persen, 1955-1960 6,3 persen, 1966-1969 5,1 persen, 1971-1977 7,8 persen, 1977-1982 6,3 persen, 1982-1987 8,5 persen, 1987-1992 13 persen, 1992-

³ Kuatnya kultur patriarki berakar pada perspektif tentang kodrat, tugas dan peran wanita yang secara tradisional meniscayakan bahwa peran dan fungsi wanita diidentifikasi sebagai pelaku peran-peran reproduksi dan peran-peran domestik, karena wanita dimitoskan memiliki keterbatasan jika melakukan peran-peran publik. Tradisi juga mengajarkan bahwa wanita itu dipimpin bukan memimpin. Lemahnya posisi wanita juga disebabkan ketergantungan yang cukup tinggi kepada laki-laki baik secara sosial maupun ekonomi. (LKPSM, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoks*, editor M.Jadul Maula, Yogyakarta, hal.11)

1997 12,5 persen, 1999-2004 9 persen, 2004-2009 11,6 persen dan 2009-2014 18 persen . Lebih lengkapnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Perempuan Dalam DPR⁴

Masa kerja DPR	Perempuan	Laki-laki
1950-1955 (DPR Sementara)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955 –1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956 –1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971 –1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977 –1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982 –1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987 –1992	65 (13%)	500 (87 %)
1992 –1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997 –1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	65(11,6%)	435(87%)
2009-2014	100(18%)	459(82%)

Dari tabel diatas terlihat bagaimana peran perempuan dalam dunia politik legislatif terlihat masih sangat memprihatinkan. Perbandingan antara refresentasi perempuan dan laki-laki di legislatif jauh selisihnya. Ini membuktikan bahwa laki-laki memang mendominasi setiap periode di lembaga legislatif atau DPR RI.

Sejumlah data tersebut telah menjelaskan, bahwa tingkat perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan perwakilannya di kursi parlemen masih belum seimbang. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, pihak perempuan harus mampu memberdayakan dirinya melalui keikutsertaan pada setiap kegiatan baik yang bersifat formal maupun non formal.

⁴ Sekretariat DPR 2001. Diolah kembali oleh Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO. Diakses melalui <http://www.cetro.or.id>. Pada tanggal 15 Juli 2013

Peningkatan keterwakilan perempuan yang dihasilkan pada Pemilu 2009, seperti yang tergambar dalam tabel diatas, masih terlalu dini jika dikatakan telah mematahkan asumsi bahwa sistem suara terbanyak berdampak negatif pada keterwakilan perempuan seperti yang diyakini oleh sejumlah ahli ilmu politik. Jika hasil tersebut disimak lebih jeli, tampak bahwa sebagian besar (94,1%) calon terpilih perempuan yang berhasil menduduki kursi di parlemen berada di urutan teratas (1 sampai 3).

Artinya, nomor urut tetap menjadi faktor penting sebagai salah satu faktor keterpilihan kandidat. Tanpa pengaturan nomor urut, dengan jumlah partai yang sangat besar dan kandidat setiap dapil yang sangat banyak, hampir tidak mungkin pemilih mampu mengenali calonnya dengan baik dan memilih kandidat pilihannya di nomor berapa pun yang bersangkutan ditetapkan.⁵

Akan tetapi seiring dengan perkembangan politik dan mungkin juga seiring dengan gerakan feminisme yang terus berkembang pasca 70-an tuntutan akan peran politik perempuan semakin berhembus kencang. Aktifis-aktifis yang umumnya banyak dari kalangan perempuan sendiri sudah tidak dapat menerima bahwa perempuan hanya subordinat laki-laki. Akibatnya muncul berbagai gerakan atau gugatan dari kaum perempuan yang merasakan ketidakadilan politik bagi kaumnya.

Gerakan ini dapat dilihat dengan ditempuhnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Undang-Undang pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 pada Pasal 65 ayat (1). Pasal ini memuat ketentuan yang berbunyi “ Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat

⁵ Buku Panduan Legislatif, *Kerja Untuk Rakyat* 2009 .Hal. 24

megajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dengan adanya penetapan 30% bagi perempuan dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah pada Pemilihan Umum, merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilihan umum.

Dan kemudian juga dalam kepengurusan partai juga diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 10/2008 tentang partai politik yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat (DPP). Kondisi ini juga memberikan kebebasan kepada perempuan untuk ikut aktif dalam partai yang harus ikut berperan dalam struktur kepengurusan partai.

Tapi kenyataannya tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Walaupun sudah ada ketetapan 30% bagi calon legislatif dan keikutsertaan perempuan dalam kepengurusan partai, dalam praktisnya masih banyak kendala yang dihadapi kader perempuan, baik dari internal partai maupun dari eksternal partai.

Setiap partai yang memajukan caleg perempuannya memang keterwakilan 30% tercapai secara kuantitas saja. Namun tidak dalam kualitas. Caleg itu masih tetap didominasi laki-laki pada nomor-nomor jadi, seperti nomor satu dan dua, sedangkan nomor tiga baru perempuan. Biasanya urutannya adalah sebagai berikut; pria, pria, wanita, pria, pria, wanita, pria-pria, wanita.

Terkesan hanya prosedural, legal rasional atau sekedar memenuhi ketentuan Undang-Undang (UU), begitu pula dalam internal partai, peran perempuan itu masih sangat dipinggirkan. Seperti pada struktur kepengurusan partai, perempuan tidak menjadi pengurus inti dalam pengambil kebijakan.

Kenyataan demikian tidak saja secara umum, namun juga secara khusus atau sub-demi sub dalam seluruh sendi kehidupan tetap berlangsung. Termasuk dalam struktur organisasi Golkar Kabupaten Ogan Ilir yang kenyataannya laki-laki mendominasi jumlah pengurus partai.

Hal ini dilihat minimal dari struktur kepengurusannya. Dari seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir dari total jumlah pengurus sebanyak 68 orang, hanya terdapat 10 (sepuluh) orang perempuan. Kader perempuan yang menjadi pengurus di DPD Partai Golkar Ogan Ilir menduduki bidang-bidang yang belum strategis karena belum berada pada posisi pegambil kebijakan dalam partai seperti posisi Ketua atau Wakil Ketua. Perempuan-perempuan tersebut hanya menduduki posisi ketua bagian dan anggotanya saja yaitu 1 (satu) orang menjabat sebagai ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan, 2 (dua) orang wakil sekretaris dalam bidang pengabdian masyarakat dan bidang peranan perempuan, 1 (satu) orang sebagai wakil bendahara, dan 6 (enam) orang menduduki posisi sebagai anggota bagian⁶. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara organisasi, partai Golkar menyadari bahwa posisi yang diperoleh perempuan adalah bukan posisi pengambil kebijakan, perempuan masih berada pada peran-peran sosial kemasyarakatan dan peran-peran domestik. Sementara peran-peran yang lebih strategis seperti *policy maker* dan *decision maker* belum banyak disentuh oleh kaum perempuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan politik ini khususnya yang terjadi pada Partai Golkar lahir akibat hubungan kuasa (*power balance*) yang timpang dipihak pria. Mereka terlalu lama menduduki posisi sebagai pembuat dan

⁶ Sumber: data Buku Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2009-2014

pelaksana kebijakan, sehingga mereka cukup *power full* di bidang politik. Kondisi ini menjadikan pria secara psikologis merasa kurang aman jika terlalu banyak wanita yang memasuki wilayah publik khususnya dalam partai politik karena khawatir kekuasaannya diambil alih.

Terlihat bahwa masih kuatnya dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan di Partai Golkar dan peran atau fungsi-fungsi partai masih dikuasai oleh kaum pria. Dengan adanya permasalahan di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang "Budaya Patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014"

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran budaya patriarki di Partai Golkar. Untuk mengetahui hal tersebut maka pertanyaan mendasar yang paling penting adalah "Sejauh mana implementasi budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014?"

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014.

1.4 Manfaat

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu informasi ilmiah baik untuk pengembangan ilmu sosiologi khususnya dalam kajian sosiologi

gender yang terkait dengan kajian mengenai budaya patriarki serta memberikan masukan atau sumbangan pada ilmu-ilmu sosial dan dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu yang berkaitan dengan budaya patriarki.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan informasi, serta solusi bagi Partai Golkar Ogan Ilir untuk melihat gambaran budaya patriarki di partai Golkar kabupaten Ogan Ilir. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kader perempuan partai untuk dapat mampu bersaing dan mampu menduduki posisi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dalam partai.

1.5 Tinjauan pustaka

Sebelum sampai kepada kerangka pemikiran, konsep, teori atau pendekatan dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan lebih dulu beberapa tulisan, penelitian atau referensi yang berhubungan dengan masalah atau tema penulisan. Beberapa referensi yang terpilih antara lain adalah karya Sita Van Bemmelen dengan tema “Gender dan Pembangunan”: Apakah yang baru ?, Tapi Omas Ihromi Ihromi dengan tema “Otonomi Wanita”, Isbodroini Suyanto dengan tema “Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Perempuan”, Hj Khofifah Indar Parawansa dengan tema “Peluang dan Kendala Perempuan di sektor publik/politik” dan Umbu TW Pariangu dengan tema Perempuan dan surga yang hilang.

Kelima referensi ini dianggap telah memadai untuk membuat kerangka pemikiran, konsep atau pendekatan yang akan dipergunakan dalam penulisan ini. Sita Van Bemmelen dalam tulisannya menyatakan bahwa secara umum pandangan yang menganggap perempuan subordinat dari pria telah berlangsung

sejak lama. Tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Barat. Di Barat bahkan terang-terangan dinyatakan bahwa kaum lelaki sejak lama telah mendominasi bidang publik umum, sedangkan wanita hanya di lingkungan rumah tangga (Bemmelen, S V, 1995:182).

Gagasan tersebut menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional sesudah Indonesia mencapai kemerdekaannya, karena para perencana asing maupun elit-elit Indonesia sendiri yang memanager pembangunan adalah berlatar belakang pendidikan Barat (Bemmelen, S,V, 1995:182).

Keadaan yang tidak lazim ini secara sengaja ataupun tidak kenyatannya terus dilestarikan. Begitu terus menerus sehingga seakan-akan keadaan itu adalah hal yang alamiah, padahal kenyatannya tidak seperti itu. Khususnya tentang pandangannya tentang wanita Indonesia yang sering dikonotasikan secara tradisional adalah ibu rumah tangga tidaklah kenyataan yang sesungguhnya melainkan hanya mitos.

Oleh karena itu secara singkat dapat dikatakan bahwa pandangan yang menyatakan wanita subordinat pria tidaklah alamiah, melainkan suatu konstruksi sosial atau buatan manusia. Pendapat-pendapat seperti ini telah dibenarkan para ahli sejarah.

Tapi Omas Ihromi yang banyak melakukan penelitian terhadap peran-peran wanita mempunyai pandangan yang banyak diwarnai pendapat pakar Asing menjabarkan posisi inferior wanita dari berbagai segi.

Segi pertama adalah pandangan yang melihat subordinasi wanita dari pria adalah kenyataan universal. Pendapat ini dikemukakan Moore dan Otner.

Keduanya berpendapat bahwa secara umum kedudukan pria memang lebih tinggi dari wanita diseluruh dunia.

Kedudukan yang timpang tersebut tidak semata-mata karena faktor biologis, melainkan secara kultural, yakni secara kultural kedudukan wanita lebih rendah dari pria. Pada budaya seperti itu keunggulan pria terhadap wanita memang sudah kodratnya, Sebaliknya wanita itu secara alamiah menjadi subordinatnya. Lebih jelasnya dapat dibaca dalam kutipan dibawah ini:

“Kebudayaan yang berusaha untuk menguasai alam, dan menggunakannya untuk kepentingan manusia, karena itu kebudayaan dianggap lebih superior terhadap alam. Wanita, demikian Ortner, dimana-mana diasosiasikan dengan yang alamiah, karena fisiologi wanita, dan fungsi-fungsi khusus wanita yaitu reproduksi membuatnya kelihatannya lebih dekat pada alam. Berbeda dengan wanita yang kreatifitasnya telah terpenuhi oleh proses kelahiran, maka pria harus mencari cara budaya untuk berkreasi seperti teknologi. Karena kebudayaan berusaha menguasai alam, maka akibatnya adalah bahwa wanita yang lebih diasosiasikan dengan alam itu, memperoleh penilaian yang lebih rendah daripada pria”(Ihromi. T O, 1995:434)

Selain alasan demikian Ortner juga memberikan pendapat lain, yakni bahwa pada diri wanita ada kecenderungan pembatasan peran-peran sosial yang berkaitan dengan proses reproduksi yang hanya berputar dalam ranah domestik, yakni pada hanya “pengasuhan anak”, yang dianggap prasosial sebab anak belum merupakan insan yang ikut membentuk kebudayaan.

Konsekuensinya wanita terjerat dalam (hanya) kehidupan keluarga dan pengasuhan anak. Sebaliknya kehidupan lelaki yang sangat menguasai kebudayaan, dominan dalam kehidupan diluar rumah tangga/pengasuhan anak, yakni dalam bidang publik dan politik. Oleh karenanya, lelaki diidentikkan

dengan masyarakat, dan kepentingan publik, sedangkan wanita diasosiasikan dengan keluarga.

Penulis lain yang bertolak belakang dengan pandangan demikian adalah Leacock. Leacock dalam bukunya *Feminism and Antropology*, menyerang pendapat yang dikemukakan Ortner dan kawan-kawan. Dia tidak setuju bahwa status wanita secara langsung hanya berkaitan dengan fungsi melahirkan atau pengasuhan anak.

Ketimpangan antara pria dan wanita, perkembangan bentuk keluarga sebagai suatu unit ekonomi serta perkawinan yang monogami, erat kaitannya dalam perkembangan kepemilikan pribadi sebagai faktor produksi. Artinya ada tidaknya wewenang wanita mengontrol sumber daya yang tersedia atau apakah wanita tersebut menaruh akses terhadap sumber daya itu

Pendapat ketiga adalah pendapat yang menggabungkan kedua pendapat tersebut. Pendapat yang lebih sosiologis ini menyatakan bahwa proses politik dan proses produksi tidak dapat dipahami terlepas dari persepsi budaya yang dimiliki oleh warga masyarakat mengenai proses-proses tersebut (Jane Collier dan Michelle Rosaldo dalam Ihromi, TO, 1995:436)

Dengan demikian menurut Jane Collier dan Michelle Rosaldo akan dapat diadakan hubungan atau kaitan antara pemikiran-pemikiran mengenai gender dengan hubungan-hubungan sosial yang aktual dimana para individu yang harus berperan sebagai pria dan wanita hidup, bertindak dan berpikir.

Dalam konteks atau hubungannya dengan dunia politik lebih khusus terhadap sosialisasi dan partisipasi, Isbodrini Suyanto menyatakan:

“Wanita dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan, terutama pada negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan wanita berkisar dalam lingkungan keluarga

seperti mengurus suami, anak-anak, memasak dan sebagainya. Sedangkan politik yang digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan “power” atau “kekuasaan”, dari sejak dahulu, adalah bidang yang selalu dikaitkan dengan dunia laki-laki, dan seakan-akan “tabu” dimasuki oleh perempuan. Sosialisasi dalam keluarga, baik dimasyarakat Barat maupun Timur, selama berabad-abad telah menempatkan perempuan di luar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan”.

Untuk melengkapi ketiga tulisan pakar diatas selanjutnya akan diteruskan ke tulisan seorang praktisi politik wanita yang sudah malang melintang dalam dunia kekuasaan sejak lama. Ia adalah Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana pandangannya akan dikutip dibawah ini;

“Organisasi-organisasi perempuan yang cukup banyak dan beragam, agaknya masih cenderung berkonsentrasi pada peran-peran sosial kemasyarakatan dan peran-peran domestik. Sementara peran-peran yang lebih strategis seperti policy maker dan desition maker belum banyak disentuh. Dibanding kaum laki-laki, kaum perempuan Indonesia belum mampu secara proporsional mempengaruhi atau menentukan proses dan produk kebijaksanaan (politik) secara lokal maupun nasional. Perkembangan dan peran politik perempuan bergerak sangat lambat. Sementara bila ditinjau secara juridis formal, baik dalam GBHN maupun dalam UUD 1945, hak politik antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Dengan demikian, sebenarnya dalam pembangunan politik yang berjalan selama ini terdapat rantai yang terputus, sehingga terjadi konsistensi implementasi antara hak politik perempuan dengan peran politiknya. Akibatnya muncul berbagai gugatan dari kaum perempuan yang merasakan adanya ketidakadilan politik bagi kaumnya.(Khofifah I P,1999:6)”

Keempat penulis diatas diperkuat oleh Umbu TW Pariangu yang menyatakan meskipun gerakan feminism telah berkembang, Undang-Undang Partai Politik/Pemilu dan atau khususnya keterwakilan 30 persen perempuan telah ditetapkan dalam faktanya perempuan masih tetap tertawan budaya politik patriarki. Lebih jelasnya diuraikan dibawah ini:

“Namun jumlah itu tetap masih minim dibandingkan dengan kesempatan yang direguk lawan jenisnya. Dalam derap politik, ditelapak kaki perempuan masih belum tersimpan “surga”. Pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengisyaratkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan politik untuk

mereka mentaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk memisahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”.

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab, penguasa, pembimbing, pelindung kaum perempuan (istri). Dengan demikian jelaslah bahwa posisi laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) adalah posisi superior dan inferior. Oleh sebab itu laki-laki secara otomatis sebaga pemimpin. Dan perempuan harus menerima posisi orang yang dipimpin. Yang menjadikan laki-laki sebagai superioritas ada dua alasan, mengapa laki-laki memimpin atas perempuan: *pertama*, karena Allah telah melebihkan mereka atas laki-laki atas sebahagian yang lain. Dan *kedua*, karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya.

Dan karena kelebihan laki-laki ini, maka kepemimpinan baik untuk wilayah domestik maupun publik/politik berada di tangan laki-laki, terutaman untuk kepemimpinan negara (imam/khalifah). Mereka percaya pada kelebihan laki-laki atas perempuan ini berdasarkan ayat al-Quran 4 : 34. Pandangan superioritas laki-laki tidak hanya merupakan pandangan para ahli fiqh. Para ahli tafsir baik yang klasik maupun modern juga memperlihatkan pandangan yang sama. Ayat ini menjadi sangat krusial, karena dari ayat ini bermuara seluruh persoalan peran-peran perempuan dalam wilayah domestik maupun publik.

Dalam analisa yang lain minimal ada tiga alasan yang sering digunakan sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik yaitu: *pertama*, ayat al-Qur'an an-Nisa 4:34 yang artinya “*lelaki adalah pemimpin bagi perempuan*”. Kedua, hadis yang mengatakan bahwa “*Akal wanita urang cerdas disbanding dengan laki-laki*”. Ketiga, hadis yang menyatakan bahwa “*Tidak akan*

menduduki kursi parlemen, politik perempuan masih ditimpa kuasa patriarkhat yang belum menghargai urgensi perempuan dalam kerja politik inkklusif. Kuota 30 persen calon anggota legislatif perempuan dipatuhi seadanya tanpa proses pengaderan yang bermutu (Umbu TW Pariangu, Kompas 8 Juni 2013)”.

1.6 Kerangka Pemikiran

Bab ini akan mendiskusikan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk melakukan penelitian yang berjudul Budaya Patriarki di Partai Politik (Studi pada Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014). Beberapa teori tersebut akan dijelaskan seperti dibawah ini.

1.6. 1 Penafsiran Klasik Ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi

Dalam kitab-kitab klasik yang menjelaskan dan menfsirkan teks-teks ajaran Islam tidak asing lagi bahwa kaum laki-laki digambarkan lebih superior dari kaum perempuan. Biasanya argumen penguatan supremasi tersebut menggunakan ayat al-Qur'an dan hadis yang bersumber pada Nabi. Penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan situasi sosio kultural pada waktu penafsiran itu dilakukan. Pada saat ini dimana kedudukan dan peranan perempuan dan laki-laki berkompetisi sama maka tafsir-tafsir lama perlu dibongkar khususnya dari pandangan yang misoginis (pandangan yang membenci perempuan).

An-Nisa 4 : 34⁷ menyatakan :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suami tidak hadir oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya* (pelanggaran kewajiban suami isteri), nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan hukumlah mereka. Kemudian jika

⁷ Editor M. Jadul Maula, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, hal 83

berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan”⁸.

Ayat dan hadis inilah yang digunakan sebagai ‘senjatan pamungkas oleh mereka yang ingin mengucilkan perempuan dari panggung politik, menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan laki-laki.

Secara normatif Islam tidak menghambat perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik serta memegang posisi yang penting karena pada dasarnya Islam mendukung kondisi egaliter antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan strata antara laki-laki dan perempuan, yang membedakannya adalah ketaqwaannya seperti dalam surat an-Nisa 4:32 yang berbunyi “ *bagi orang laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan*”⁹. Dan juga al-Qur’an surat at-Taubah : 71¹⁰ dikatakan bahwa hak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa, serta melakukan *amar makruf nahi munkar* menuju terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera baik laki-laki maupun perempuan

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik selama tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk beribadah, peningkatan ilmu dan taqwa dan kewajiban yang sama untuk melakukan kebajikan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera.

⁸Editor M. Jadul Maula, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, hal 90

⁹ Editor M. Jadul Maula, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, hal 98, 99

¹⁰ Tanti Murjayani, 2010. *Rekrutmen dan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Wonosobo*. Skripsi Fisip Universitas Negeri Yogyakarta.

1.6. 2 Budaya Patriarki

Dari uraian tinjauan pustaka di atas secara singkat patriarki diartikan sebagai dominasi laki-laki terhadap perempuan. Suatu pembagian kerja, tugas atau fungsi yang didasarkan kepada jenis kelamin, dimana perempuan menjadi subordinasi laki-laki. Pendapat-pendapat seperti diperkuat antara lain Kamla Bhasin, Juliet Mitchell, dan Gerda Lerner Menurut Edward Burnt Tylor budaya adalah sebagai keseluruhan kompleks pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan kalimat lain, namun substansi yang sama Selo Sumardjan mengatakan kebudayaan itu adalah seluruh hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Adapun wujudnya menurut Koentjaraningrat terdiri atas tiga hal, yakni gagasan, aktivitas dan artefak.

Dalam skripsi ini yang digunakan adalah yang berbentuk aktivitas, yakni sistem sosial, tentang kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta berinteraksi satu dengan lain, yang dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan (Koentjaraningrat, 1980:12)

Kamla Bhasin menyatakan patriarki adalah suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Dalam sistem ini laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi segala hal. Suatu keadaan yang dianggap wajar (given) karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Hubungan itu selanjutnya

mempengaruhi relasi subordinasi, hubungan atas – bawah dimana laki-laki yang mendominasi dalam semua aspek.

Juliet Mitchell (dalam Kamla Bhasin) secara psikologis membenarkan bahwa perempuan adalah dibawah kekuasaan atau subordinasi laki-laki. Hal ini sebagai konsekwensi dari sistem kekerabatan yang menempatkan laki-laki mempertukarkan perempuan dan merujuk kepada kekuatan simbolis yang dijalankan ayah (laki-laki). Kekuasaan ini selanjutnya berdampak psikologis perempuan terinferiorkan. Terinferiorkan sebagai implikasi alamiah dari eksistensi laki-laki dan perempuan yang berbeda biologis/seksual, dimana posisi laki-laki lebih dominan.

Garda Lerner menyatakan secara agama bahwa perempuan memang disubordinasikan kepada laki-laki, sebab perempuan memang dilahirkan seperti itu kodratnya. Setiap masyarakat melakukan hal itu, yakni perempuan memang dibawah laki-laki, karena perbedaan biologisnya. Kesimpulannya adalah bahwa perempuan subordinasi atau dibawah kekuasaan laki-laki.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang bahwa perbedaan biologis antara keduanya

1.6.3 Budaya Jawa

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat dengan adat dan budaya yang sangat patriarkis. Sangat dilarang bagi perempuan untuk tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi, apalagi sampai teriak-teriak. Ia harus duduk dengan manis dan menuruti apa yang dikatakan ayah dan ibu. Anak perempuan Jawa yang tumbuh dewasa selalu „dicekoki“ dengan berbagai nilai dan norma kesopanan karena bagi masyarakat Jawa, anak perempuan harus memahami arti kesopanan.

Namun celakanya, siapa yang berhak menetapkan arti kesopanan ini masih rancu. Apakah orang tua pada umumnya, orang tua perempuan, atau ini hanya dorongan dari orang tua laki-laki saja. Lingkungan yang lebih luas seperti keluarga besar dan tetangga sekitar pun merasa memiliki kewajiban untuk turut serta dalam „mendidik“ anak perempuan. Budaya patriarki inilah yang berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya yang nampaknya sudah ditentukan sepenuhnya oleh konstruksi sosial dan kultural yang patriarkal. Dalam masyarakat, mereka (perempuan) dijadikan the second sex (suatu konsep yang dijadikan subordinasi yang terus menerus dibangun oleh masyarakat patriarki, padahal Tuhan sendiri tidak pernah menjadikan perempuan sebagai makhluknya yang berada di kelas kedua dan kehadirannyapun bukan semata-mata sebagai pelengkap lelaki)

Sehingga pada akhirnya perempuan kurang memiliki akses untuk pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya. Hingga sekarang ini, anggapan bahwa anak perempuan kurang berhak atas pendidikan tinggi masih sangat kental di masyarakat, apalagi bila kebetulan ia terlahir dari kalangan keluarga menengah ke bawah. Bila dalam keluarga ini ada anak perempuan dan anak laki-laki, maka diprioritaskan terlebih dahulu untuk menempuh pendidikan tinggi adalah anak lelaki. Sedangkan anak perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi merupakan suatu yang kondisional. Mereka melihat dahulu seperti apa kondisi finansial keluarga. Mereka mengatakan “anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh nanti larinya akan ke dapur juga” mungkin ungkapan-ungkapan misoginis ini sudah menggaung di kalangan masyarakat Jawa seperti dapur, sumur, kasur. Kaum perempuan masih dicitrakan sebagai konco wingking, sama sekali tidak berhak mengurus masalah-masalah publik yang hal

ini dipandang sebagai wilayah laki-laki. Ini jelas bertentangan dengan semangat yang dibangun Caroline Mosser, bahwa persoalan perempuan menyangkut tiga peran (the triple role) yaitu domestik, publik, dan sosial.

Bahwa perempuan memiliki hak untuk berperan dalam ketiga ranah tersebut. Adapun adagium Jawa yang mengatakan *suwargo nunut neroko katut* (masuk atau tidaknya istri ke surga adalah tergantung suami. Suatu ungkapan yang menyatakan ketidakberpihakan masyarakat akan kebebasan kaum perempuan untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri sehingga akses perempuan dalam dunia politik memiliki keterbatasan dan ketidakadilan.

1.6.4 Partai Politik

A. Arti dan fungsinya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. (Budiardjo, M, 2000:160-161)

Menurut Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, arti partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dari definisi Miriam Budiardjo dan UU No 2 Tahun 2008 ini tercatat beberapa istilah, kata atau konsep, seperti;

- kelompok yang terorganisir
- orientasi, kesamaan kehendak dan cita-cita
- merebut kekuasaan dan
- melaksanakan kebijakan

Hal ini diperkuat akan fungsi partai politik dalam UU No 8 Tahun 2012, yakni:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
3. Penyerap, penghimpun, dan pengatur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

Dari fungsi di atas, tampak bahwa partai politik di Indonesia secara konstitusional menyimpan tujuan bagi masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Seperti halnya dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban, menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka ideologi bangsa dan menjamin suatu kedaulatan rakyat pada tiap kebijakan yang diambil oleh pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

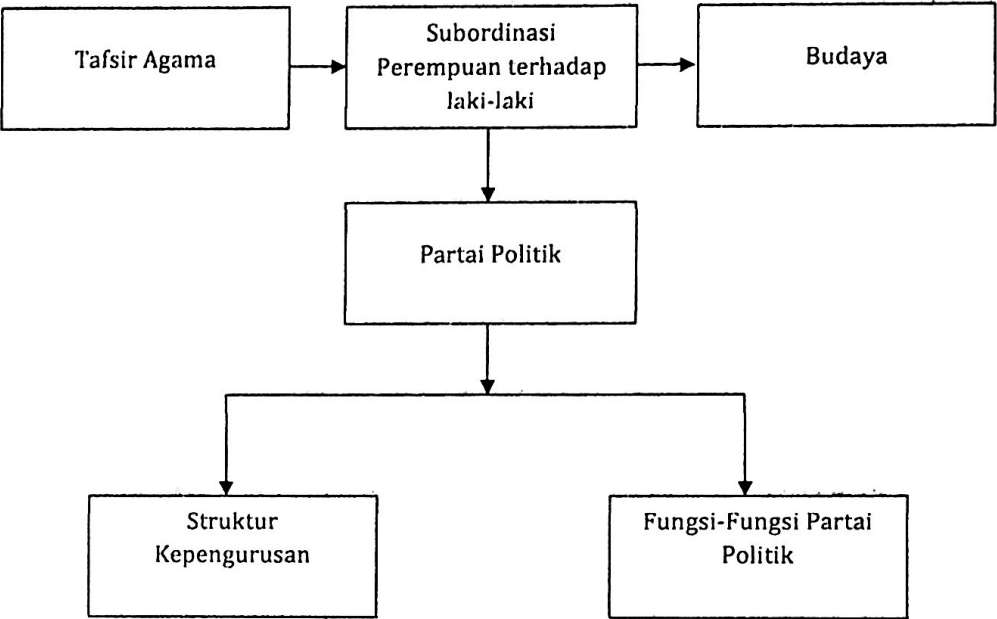
Artinya partai politik itu adalah suatu institusi, lembaga, atau kelompok yang terorganisir. Sebagai institusi suatu organisasi biasanya terdiri dari pengurus dan peran-peran/fungsi-fungsi partai politik.

Pengurus tersebut terikat sebagaimana suatu institusi terjalin dalam satu susunan, hierarkhi, yakni struktur organisasi. Agar fungsional, maka struktur ini punya fungsi-fungsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik untuk partai di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Untuk mempermudah pemahaman kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 1

Kerangka Berpikir Budaya Patriarki di Partai Politik



1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Batasan Konsep

Guna menghindari terjadinya interpretasi lain atas judul penelitian ini secara etimologis maupun terminologis, peneliti akan memaparkan definisi operasional, pada penelitian ini adalah;

1. Budaya patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki menurut subordinasi perempuan (wikepedia, budaya patriarki akses tgl 10 mei 2014)
2. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.(M. Budiardjo 2000 :160-161)

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, karena lebih memfokuskan pada proses penelitian, dipilihnya teori (ontologi), dipilihnya metode (evistimologi), dan dipilihnya teknik analisis (metodelogi). Mendefinisikan proses di sini diartikan sebagai tindakan pengamatan mengenai apa yang dilihat melaui proses pemahaman keseluruhan tindakan yang dilakukan di lapangan, serta memahami nilai kontekstual yang dicari. Proses ini tidak terlepas dari penggunaan teori. Teori

di sini diartikan sebagai jembatan antara ide-ide alamiah dengan aplikasi Atau praktek dilapangan, tentunya dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan keadaan, bila berhadapan dengan masalah ganda, serta menyajikan secara langsung antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka serta mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, serta pengaruh bersama nilai-nilai yang akan dihadapi.

Analisis data lebih bersifat induktif, karena memiliki alasan yang berkaitan dengan kenyataan ganda, yang mampu membuat hubungan peneliti dengan informan lebih dipertajam dengan memperhitungkan nilai-nilai eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Beberapa proses tersebut di atas akan mengarah pada sifat serta sikap dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.

1.7.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, karena sasarannya adalah mencari atau menggali tentang budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir periode 2004-2014. Soeharsimi Arikunto (1991 : 25) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai data dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya.

Penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat tentang fakta-fakta actual dan sifat populasi tertentu (Margono S, 1997 : 8). Sedangkan menurut Sanafiah Faisal (2001: 20) penelitian deskriptif (*descriptive research*) dimaksudkan untuk eksplorasi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong (2007 : 11).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif karena prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Hal ini sejalan dengan yang dikutip Lexy J. Moleong (2004 : 4) berdasarkan pendapat Bogdan dan Taylor (1975 : 5). Menurut Sugiyono (2008 :9) metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah di kantor DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Serai Indah Indralaya Ogan Ilir. Alasan penulis memilih tempat lokasi penelitian ini karena didasarkan pada argumen bahwa Partai Golkar adalah partai yang memiliki struktur yang rapi, partai tertua, dan partai yang selalu menang dalam pemilu legislatif untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

1.7.5 Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informan merupakan orang-orang yang karena posisinya sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai data yang dibutuhkan peneliti. Subyek penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu pemilihan subjek penelitian dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu. Maka ditentukan subjek penelitian, sebagai berikut:

- 1) Penasehat Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir
- 2) Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir

- 3) Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir
- 4) Pengurus perempuan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Informan ini berperan penting dalam memberikan sejumlah informasi mengenai keadaan dan perkembangan partai serta bagaimana peran dan fungsi perempuan di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Informan ini juga mengarahkan peneliti mengenai berbagai informasi dalam pengambilan data selanjutnya.

I.7.6 Unit Analisis

Unit analisis yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu struktur kepengurusan partai dan keaktifan perempuan dalam menjalankan peran dan fungsi partai. Fenomena semacam ini selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan penelitian budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014.

I.7.7 Data dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara .Data primer tersebut selain didapat dari informan utama yang menjadi subjek dalam penelitian ini, juga didapat dari beberapa informan pendukung yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi untuk mendeskripsikan fenomena

penelitian mengenai budaya patriarki di Partai Golkar Ogan Ilir Periode 2004-2014 ini.

Data primer atau sumber data utama merupakan data yang diperoleh melalui proses wawancara, atau sejumlah kegiatan pengamatan melalui gabungan kegiatan, melihat, mendengar, dan bertanya, (Lexy Maleong, 2001).

Data primer atau sumber yang dimaksudkan dalam penelitian, merupakan sejumlah data yang menjadi dasar pertanyaan serta berkaitan langsung dengan informan yang mengikuti seluruh kegiatan partai. Data tersebut mengenai keaktifan perempuan dalam menjalankan peran dan fungsi partai Golkar Ogan Ilir .

Pengambilan data langsung ditentukan langsung oleh informan baik dilakukan di rumah maupun di tempat lainnya (di kantor). Pengkondisian pengambilan data dilakukan mengingat organisasi sosial politik ini akan menghadapi pemilihan umum mendatang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, maupun sejumlah buku referensi baik milik organisasi, maupun diluar organisasi. Data dari organisasi meliputi data jumlah kader, struktur, AD/ART Partai, buku panduan dan lain sebagainya. Sedangkan data di luar organisasi seperti statistik kedudukan, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya.

Data sekunder yaitu data yang menunjang penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui : studi pustaka berupa bahan-bahan literatur kepustakaan, laporan penelitian, karya ilmiah

lainnya yang ada hubungan dengan permasalahan penelitian, monografi kabupaten Ogan Ilir meliputi data dasar sejarah ogan ilir, serta data dari mengenai profil Ogan Ilir.

1.7.8 Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka untuk keperluan analisisnya ada beberapa metode dan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data di lapangan antara lain :

1. Metode Observasi

Yakni pengamatan dan pencatatan sistematis. Dalam penelitian budaya patriarki di Partai Golkar Ogan Ilir, observasi berguna untuk melihat sejauh mana gambaran budaya patriarki di partai Golkar Ogan Ilir. Observasi yang dilakukan yakni dengan melihat dan mengamati struktur kepengurusan partai dan mengamati peran dan fungsi perempuan dalam partai.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Basrowi, 2008 : 127). Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2007 : 186), antara lain mengontruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi dan lain-lain.

Dilihat dari peranan pewawancara dan responden, teknik wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dan wawancara tak

terstruktur (Moleong J (2007 :190). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaannya yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk menentukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Tanya jawab dilakukan mengalir seperti pada percakapan sehari-hari.

Berdasarkan jenis wawancara di atas, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Hasil wawancara sebagai data primer yang didapat dari subyek penelitian yang telah ditentukan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, 2008 : 158). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi.

Guba dan Lincoln yang diikuti Lexy J. Moleong (2007 : 216) mengemukakan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang digunakan sebagai sumber data untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Menurut Sugiyono (2008 : 240) dokumentasi merupakan

catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang .

Teknik dokumentasi adalah suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpulkan dan meluruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut (Winarno Surachmad, 1980 :143).

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dan pelengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data primer dari hasil wawancara. Dokumentasi diambil untuk data-data serta catatan-catatan yang berkaitan dengan gambaran budaya patriarki di Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir Periode 2004-2014.

1.7.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-dara yang diperoleh perlulah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah *cross check* data. *Cross check* data dilakukan manakala pengumpul data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda, membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara dengan hasil dokumentasi (Bungin, 2001 : 95-96). Agar keabsahan agar terjamin akurat dan sesuai dengan data-data yang ada, maka dari hasil wawancara mengenai budaya patriarki di partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir periode 2004-2014 dilakukan *cross check* dengan dokumen-dokumen yang diperoleh.

1.7.10 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Platton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data (Lexy J. Moleong, 2007 :280). Sedangkan analisis data menurut Bogan Dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong (2007:280) adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif. Dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian ditarik kesimpulan yang umum, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Tahap Reduksi Data

Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu peneliti perlu melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna yang digunakan dengan jalan memilih data yang pokok atau inti, yang mengarah pada pemecahan masalah sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian tentang budaya patriarki di partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir periode 2004-2014.

2. Unitisasi/Kategorisasi

Data yang telah disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengan sifat dari masing-masing data dengan menonjol hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Dari unit-

unit data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipilih-pilih kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.

3. Display Data

Display data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini data yang telah direduksi dipaparkan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan mengenai budaya patriarki di partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir periode 2004-2014.

4. Tahap Kesimpulan (*Verifikasi*)

Maksudnya sejak awal peneliti harus berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya tentang budaya patriarki dalam dunia politik di Ogan Ilir. Sehingga dari data yang diperolehnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru (Usman, 2001).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiaharjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia . Jakarta.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah pembahasan sosiologis tentang peran wanita dalam masyarakat*. PT. Gramedia.
- Maleong M.A, Dr.Lexky J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kwalitatif*, PT: Remaja Rosdakarya Jakarta.
- Opini, 8 Juni 2013, *Perempuan dan Surga Yang Hilang*. Kompas, Jakarta
- Soetjipto, Ani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Dewi Sartika, Diana. 2007. *Peranan Politik Perempuan (Dinamika Gerakan Feminisme di Parlemen*. Elmatara Publishing.
- Wikipedia Indonesia. *Daftar partai politik Indonesia*. Akses pada tanggal 24 Juni 2013.
- www. Cetro.or.id. *Jumlah Perempuan di DPR*. Akses pada tanggal 15 Juli 2013.
- Editor Maula. M. Jadul. 1999. *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*. LKPSM. Yogyakarta.
- Editor Tim Hapsari. 2002. *Suara Politik Perempuan*. Hapsari. Yogyakarta.
- Mulia, Siti Musdah & Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Murjayani, Tanti. 2010. *Rekrutmen dan Partisipasi Politik Perempuan*. Universitas Negeri Yogyakarta. (Skripsi).
- Editor Sri Hariti Sastriyani, 2009. *Gender and Politics*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan*. PT. Gravindo Persada. Jakarta.

Soeljipto, Ani. 2011. *Politik harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Wahana Aksi Kritika. Tangerang.

Faulks, Keith. 2012. *Sosiologi Politik*. Nusa Media. Bandung.

Editor Tim IP4-LAPPERRA. 2001. *Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi (dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan)*. IP4-Lapperra Indonesia. Jakarta.

<http://skripsippknunj.org>. *Rekrutmen dan Partisipasi Perempuan Dalam Demokratisasi*. Akses pada tanggal 15 Agustus 2013.